



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2 JAKARTA 10320
TELEPON (021) 31928280, 31928285; FAKSIMILE (021) 3103705
www.bappenas.go.id

Nomor : 02/P.01/01/2019

03 Januari 2019

Lamp. : 1 (satu) berkas

Perihal : **Seleksi Gelombang II Program Beasiswa
Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2019**

Yth.:

1. **Kepala Biro/Bagian Kepegawaian/SDM Kementerian/Lembaga;**
2. **Asisten Kepala Kepolisian Republik Indonesia Bidang Sumber Daya Manusia;**
3. **Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota (daftar terlampir).**
(Daftar terlampir)

Dalam rangka meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) untuk mendukung sinergi perencanaan pusat dan daerah serta meningkatkan kualitas ASN yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional, Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas membuka kesempatan bagi para ASN yang bekerja di Kementerian PPN/Bappenas, unit perencanaan di kementerian/lembaga, Bappeda atau instansi setingkat yang menangani perencanaan, unit perencanaan di organisasi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dan/atau unit kerja lainnya yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan, untuk mengikuti Program Beasiswa yang dikelola Pusbindiklatren Bappenas tahun 2019. **Program beasiswa untuk gelombang II meliputi pendidikan gelar jenjang S2 dalam negeri dengan pilihan program studi dan kuota masing-masing program studi terlampir.**

Calon peserta Program Beasiswa diharuskan mendaftar melalui "Registrasi *online*" di situs <http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id>. Pendaftaran melalui faksimile dan pos-el (*email*) tidak kami proses lebih lanjut.

Proses seleksi Program Beasiswa meliputi tahapan administrasi, tes potensi akademik (TPA) dan *test of english as a foreign language* (TOEFL). Persyaratan administrasi berupa dokumen pendukung harus dikirimkan secara langsung atau melalui jasa pengiriman ke: **Pusbindiklatren Bappenas (Beasiswa Diklat Gelar), Jalan Proklamasi No. 70, Jakarta Pusat 10320, paling lambat tanggal 22 Februari 2019 (cap pos).**

Dokumen pendukung pengusulan calon penerima beasiswa yang perlu dilengkapi adalah sebagai berikut:

1. Surat usulan dari Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD setempat dengan tembusan eselon 2 atasan langsung, yang menyebutkan nama peserta yang diusulkan dan telah memenuhi semua kriteria yang dipersyaratkan, belum pernah mengambil/memiliki gelar S2 untuk yang melamar beasiswa gelar S2, bertanda tangan asli dan cap basah;

2. Hasil cetak formulir registrasi *online* yang telah diisi lengkap, bermaterai, ditandatangani oleh Kepala BKD/Kepala Biro yang menangani urusan SDM dan/atau kepegawaian dan cap basah;
3. Salinan ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi dan cap basah;
4. Salinan SK kepangkatan III/a dan SK terakhir yang telah dilegalisasi;
5. Formulir pernyataan pengembangan SDM yang ditandatangani oleh Kepala BKD/Kepala Biro yang menangani urusan SDM dan/atau kepegawaian (lampiran 3.4), bertanda tangan asli dan cap basah (pilihan program studi sesuai dengan yang tercantum dalam formulir registrasi online); serta
6. Formulir wawancara tertulis (lampiran 3.5).

Terkait dengan kelengkapan berkas di atas, **mohon dipastikan kesesuaian pilihan program studi S2 Dalam Negeri**, baik yang tercantum dalam hasil cetak formulir registrasi *online* maupun formulir pernyataan pengembangan SDM. **Jika terdapat pilihan program studi yang tidak sesuai diantara berkas tersebut**, maka tidak akan kami proses lebih lanjut.

Dapat kami sampaikan pula bahwa pada Program Beasiswa 2019, kami tidak menerima nilai seleksi individual (TPA dan TOEFL), sehingga seluruh calon peserta yang memenuhi syarat administrasi namun **belum/tidak memiliki nilai TPA dan TOEFL** yang ujiannya diselenggarakan oleh Pusbindiklatren sebelumnya, serta masih berlaku (kurang dari dua tahun pada Agustus 2019), **yang bersangkutan diwajibkan mengikuti seleksi nasional yang dilaksanakan oleh Pusbindiklatren**.

Selain itu, untuk Gelombang II Program Beasiswa Pusbindiklatren S2 Dalam Negeri tahun 2019, terdapat **penambahan program studi KHUSUS untuk peserta baru gelombang II tahun 2019**, yakni (1) Manajemen Pembangunan Daerah, Institut Pertanian Bogor; (2) Magister Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan dan Pembangunan, Universitas Brawijaya; serta (3) Magister Studi Kebijakan/Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan, Universitas Gadjah Mada.

Jadwal Seleksi Gelombang II Program Beasiswa Pusbindiklatren, Kementerian PPN/Bappenas sebagai berikut:

NO	PROGRAM	WAKTU
1	Seleksi Nasional TPA Gelombang II S2 Dalam Negeri	Minggu I Maret 2019
2	Seleksi Nasional ITP TOEFL Gelombang II S2 Dalam Negeri	Minggu I April 2019
3	Pemanggilan Peserta S2 Dalam Negeri 2019	Mei 2019

*Keterangan : Jika ada perubahan jadwal, akan diinformasikan di kemudian hari.

Panduan Pelaksanaan Program Beasiswa Pusbindiklatren Tahun 2019 disampaikan terlampir. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh dengan menghubungi:

Kantor Pusbindiklatren Bappenas
 Bidang Penyelenggaraan Diklat Perencanaan Gelar
 Jalan Proklamasi no. 70 Jakarta Pusat 10320
 Telepon: 021 31928280, 31928285
 Pos-el: pusbindiklatren@bappenas.go.id
 Situs: <http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id>.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan,
dan Pelatihan Perencana



Tembusan:

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama Kementerian/Lembaga;
3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
4. Sekretaris Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten;

Buku Panduan
& Surat Penawaran



PENDIDIKAN GELAR

PUSBINDIKLATREN
BAPPENAS

TAHUN 2019

.....
GELOMBANG 2
Khusus S2 Dalam Negeri
.....

Pusb̂ndiklatren
Bappenas | Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



DAFTAR ISI

Daftar Isi	
I. Surat Penawaran	2
II. Pendahuluan	19
1.1. Latar Belakang.....	19
1.2. Tujuan.....	20
III. Program Beasiswa	21
2.1. Informasi Program Beasiswa.....	21
2.2. Persyaratan Program Beasiswa	21
2.3. Jadwal Pelaksanaan Program Beasiswa.....	27
2.4. Pilihan Program Studi	28
2.5. Prosedur Peserta	29
2.6. Komponen Biaya.....	29
2.7. Sanksi	30
IV. Lampiran	31
3.1. Format Pernyataan Rencana Studi	31
3.2. Panduan Registrasi <i>Online</i>	32
3.3. Formulir Pernyataan Pengembangan SDM.....	33
3.4. Formulir Wawancara	34

SURAT PENAWARAN



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2 JAKARTA 10320
TELEPON (021) 31928280, 31928285; FAKSIMILE (021) 3103705
www.bappenas.go.id

Nomor : 02/P.01/01/2019

03 Januari 2019

Lamp. : 1 (satu) berkas

Perihal : **Seleksi Gelombang II Program Beasiswa
Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2019**

Yth.:

1. **Kepala Biro/Bagian Kepegawaian/SDM Kementerian/Lembaga;**
2. **Asisten Kepala Kepolisian Republik Indonesia Bidang Sumber Daya Manusia;**
3. **Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota (daftar terlampir).**
(Daftar terlampir)

Dalam rangka meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) untuk mendukung sinergi perencanaan pusat dan daerah serta meningkatkan kualitas ASN yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional, Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas membuka kesempatan bagi para ASN yang bekerja di Kementerian PPN/Bappenas, unit perencanaan di kementerian/lembaga, Bappeda atau instansi setingkat yang menangani perencanaan, unit perencanaan di organisasi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dan/atau unit kerja lainnya yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan, untuk mengikuti Program Beasiswa yang dikelola Pusbindiklatren Bappenas tahun 2019. **Program beasiswa untuk gelombang II meliputi pendidikan gelar jenjang S2 dalam negeri dengan pilihan program studi dan kuota masing-masing program studi terlampir.**

Calon peserta Program Beasiswa diharuskan mendaftar melalui "Registrasi *online*" di situs <http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id>. Pendaftaran melalui faksimile dan pos-el (*email*) tidak kami proses lebih lanjut.

Proses seleksi Program Beasiswa meliputi tahapan administrasi, tes potensi akademik (TPA) dan *test of english as a foreign language* (TOEFL). Persyaratan administrasi berupa dokumen pendukung harus dikirimkan secara langsung atau melalui jasa pengiriman ke: **Pusbindiklatren Bappenas (Beasiswa Diklat Gelar), Jalan Proklamasi No. 70, Jakarta Pusat 10320, paling lambat tanggal 22 Februari 2019 (cap pos).**

Dokumen pendukung pengusulan calon penerima beasiswa yang perlu dilengkapi adalah sebagai berikut:

1. Surat usulan dari Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD setempat dengan tembusan eselon 2 atasan langsung, yang menyebutkan nama peserta yang diusulkan dan telah memenuhi semua kriteria yang dipersyaratkan, belum pernah mengambil/memiliki gelar S2 untuk yang melamar beasiswa gelar S2, bertanda tangan asli dan cap basah;

2. Hasil cetak formulir registrasi *online* yang telah diisi lengkap, bermaterai, ditandatangani oleh Kepala BKD/Kepala Biro yang menangani urusan SDM dan/atau kepegawaian dan cap basah;
3. Salinan ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi dan cap basah;
4. Salinan SK kepangkatan III/a dan SK terakhir yang telah dilegalisasi;
5. Formulir pernyataan pengembangan SDM yang ditandatangani oleh Kepala BKD/Kepala Biro yang menangani urusan SDM dan/atau kepegawaian (lampiran 3.4), bertanda tangan asli dan cap basah (pilihan program studi sesuai dengan yang tercantum dalam formulir registrasi online); serta
6. Formulir wawancara tertulis (lampiran 3.5).

Terkait dengan kelengkapan berkas di atas, **mohon dipastikan kesesuaian pilihan program studi S2 Dalam Negeri**, baik yang tercantum dalam hasil cetak formulir registrasi *online* maupun formulir pernyataan pengembangan SDM. **Jika terdapat pilihan program studi yang tidak sesuai diantara berkas tersebut**, maka tidak akan kami proses lebih lanjut.

Dapat kami sampaikan pula bahwa pada Program Beasiswa 2019, kami tidak menerima nilai seleksi individual (TPA dan TOEFL), sehingga seluruh calon peserta yang memenuhi syarat administrasi namun **belum/tidak memiliki nilai TPA dan TOEFL** yang ujiannya diselenggarakan oleh Pusbindiklatren sebelumnya, serta masih berlaku (kurang dari dua tahun pada Agustus 2019), **yang bersangkutan diwajibkan mengikuti seleksi nasional yang dilaksanakan oleh Pusbindiklatren**.

Selain itu, untuk Gelombang II Program Beasiswa Pusbindiklatren S2 Dalam Negeri tahun 2019, terdapat **penambahan program studi KHUSUS untuk peserta baru gelombang II tahun 2019**, yakni (1) Manajemen Pembangunan Daerah, Institut Pertanian Bogor; (2) Magister Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan dan Pembangunan, Universitas Brawijaya; serta (3) Magister Studi Kebijakan/Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan, Universitas Gadjah Mada.

Jadwal Seleksi Gelombang II Program Beasiswa Pusbindiklatren, Kementerian PPN/Bappenas sebagai berikut:

NO	PROGRAM	WAKTU
1	Seleksi Nasional TPA Gelombang II S2 Dalam Negeri	Minggu I Maret 2019
2	Seleksi Nasional ITP TOEFL Gelombang II S2 Dalam Negeri	Minggu I April 2019
3	Pemanggilan Peserta S2 Dalam Negeri 2019	Mei 2019

*Keterangan : Jika ada perubahan jadwal, akan diinformasikan di kemudian hari.

Panduan Pelaksanaan Program Beasiswa Pusbindiklatren Tahun 2019 disampaikan terlampir. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh dengan menghubungi:

Kantor Pusbindiklatren Bappenas
 Bidang Penyelenggaraan Diklat Perencanaan Gelar
 Jalan Proklamasi no. 70 Jakarta Pusat 10320
 Telepon: 021 31928280, 31928285
 Pos-el: pusbindiklatren@bappenas.go.id
 Situs: <http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id>.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan,
dan Pelatihan Perencana



Tembusan:

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama Kementerian/Lembaga;
3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
4. Sekretaris Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten;

Yth.:

I. BIRO KEPEGAWAIAN/SDM DAN PUSDIKLAT KEMENTERIAN/LEMBAGA:

1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
2. Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)
3. Badan Informasi Geospasial (BIG)
4. Badan Intelijen Negara (BIN)
5. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
6. Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKAMLA)
7. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
8. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
9. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
10. Badan Narkotika Nasional (BNN)
11. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
12. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
13. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
14. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
15. Badan Standarisasi Nasional (BSN)
16. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
17. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
18. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
19. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
20. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
21. Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG)
22. Kementerian Agama
23. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
24. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
25. Kementerian Dalam Negeri
26. Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi
27. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
28. Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia
29. Kementerian Kelautan dan Perikanan
30. Kementerian Kesehatan
31. Kementerian Ketenagakerjaan
32. Kementerian Komunikasi dan Informatika
33. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
34. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
35. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
36. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia
37. Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
38. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
39. Kementerian Luar Negeri
40. Kementerian Pariwisata
41. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
42. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia
43. Kementerian Pemuda dan Olah Raga

44. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
45. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
46. Kementerian Perdagangan
47. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/PPN atau Bappenas
48. Kementerian Perhubungan
49. Kementerian Perindustrian
50. Kementerian Pertahanan
51. Kementerian Pertanian
52. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
53. Kementerian Sekretariat Kabinet
54. Kementerian Sekretariat Negara
55. Kementerian Sosial
56. Kepolisian Republik Indonesia
57. Ombudsman Republik Indonesia
58. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

II. SETDA/BADAN/BIRO/BAGIAN KEPEGAWAIAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA:

1. Provinsi Aceh

- 1.1. Kabupaten Aceh Barat
- 1.2. Kabupaten Aceh Barat Daya
- 1.3. Kabupaten Aceh Besar
- 1.4. Kabupaten Aceh Jaya
- 1.5. Kabupaten Aceh Selatan
- 1.6. Kabupaten Aceh Singkil
- 1.7. Kabupaten Aceh Tamiang
- 1.8. Kabupaten Aceh Tengah
- 1.9. Kabupaten Aceh Tenggara
- 1.10. Kabupaten Aceh Timur
- 1.11. Kabupaten Aceh Utara
- 1.12. Kabupaten Bener Meriah
- 1.13. Kabupaten Bireuen
- 1.14. Kabupaten Gayo Lues
- 1.15. Kabupaten Nagan Raya
- 1.16. Kabupaten Pidie
- 1.17. Kabupaten Pidie Jaya
- 1.18. Kabupaten Simeule
- 1.19. Kota Banda Aceh
- 1.20. Kota Langsa
- 1.21. Kota Lhokseumawe
- 1.22. Kota Sabang
- 1.23. Kota Subulussalam

2. Provinsi Sumatera Utara

- 2.1. Kabupaten Asahan
- 2.2. Kabupaten Batubara
- 2.3. Kabupaten Dairi
- 2.4. Kabupaten Deli Serdang
- 2.5. Kabupaten Humbang Hasundutan
- 2.6. Kabupaten Karo

- 2.7. Kabupaten Labuhanbatu
- 2.8. Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- 2.9. Kabupaten Labuhanbatu Utara
- 2.10. Kabupaten Langkat
- 2.11. Kabupaten Mandailing Natal
- 2.12. Kabupaten Nias
- 2.13. Kabupaten Nias Barat
- 2.14. Kabupaten Nias Selatan
- 2.15. Kabupaten Nias Utara
- 2.16. Kabupaten Padang Lawas
- 2.17. Kabupaten Padang Lawas Utara
- 2.18. Kabupaten Pakpak Bharat
- 2.19. Kabupaten Samosir
- 2.20. Kabupaten Serdang Bedagai
- 2.21. Kabupaten Simalungun
- 2.22. Kabupaten Tapanuli Selatan
- 2.23. Kabupaten Tapanuli Tengah
- 2.24. Kabupaten Tapanuli Utara
- 2.25. Kabupaten Toba Samosir
- 2.26. Kota Binjai
- 2.27. Kota Gunungsitoli
- 2.28. Kota Medan
- 2.29. Kota Padangsidempuan
- 2.30. Kota Pematangsiantar
- 2.31. Kota Sibolga
- 2.32. Kota Tanjungbalai
- 2.33. Kota Tebing Tinggi

3. Provinsi Sumatera Barat

- 3.1. Kabupaten Agam
- 3.2. Kabupaten Dharmasraya
- 3.3. Kabupaten Kepulauan Mentawai
- 3.4. Kabupaten Lima Puluh Kota
- 3.5. Kabupaten Padang Pariaman
- 3.6. Kabupaten Pasaman
- 3.7. Kabupaten Pasaman Barat
- 3.8. Kabupaten Pesisir Selatan
- 3.9. Kabupaten Sijunjung
- 3.10. Kabupaten Solok
- 3.11. Kabupaten Solok Selatan
- 3.12. Kabupaten Tanah Datar
- 3.13. Kota Bukittinggi
- 3.14. Kota Padang
- 3.15. Kota Padangpanjang
- 3.16. Kota Pariaman
- 3.17. Kota Payakumbuh
- 3.18. Kota Sawahlunto
- 3.19. Kota Solok

4. Provinsi Riau

- 4.1. Kabupaten Bengkalis
- 4.2. Kabupaten Indragiri Hilir
- 4.3. Kabupaten Indragiri Hulu
- 4.4. Kabupaten Kampar
- 4.5. Kabupaten Kepulauan Meranti
- 4.6. Kabupaten Kuantan Senggigi
- 4.7. Kabupaten Pelalawan
- 4.8. Kabupaten Rokan Hilir
- 4.9. Kabupaten Rokan Hulu
- 4.10. Kabupaten Siak
- 4.11. Kota Dumai
- 4.12. Kota Pekanbaru

5. Provinsi Kepulauan Riau

- 5.1. Kabupaten Bintan
- 5.2. Kabupaten Karimun
- 5.3. Kabupaten Kepulauan Anambas
- 5.4. Kabupaten Lingga
- 5.5. Kabupaten Natuna
- 5.6. Kota Batam
- 5.7. Kota Tanjung Pinang

6. Provinsi Jambi

- 6.1. Kabupaten Batanghari
- 6.2. Kabupaten Bungo
- 6.3. Kabupaten Kerinci
- 6.4. Kabupaten Merangin
- 6.5. Kabupaten Muaro Jambi
- 6.6. Kabupaten Sarolangun
- 6.7. Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- 6.8. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- 6.9. Kabupaten Tebo
- 6.10. Kota Jambi
- 6.11. Kota Sungai Penuh

7. Provinsi Bengkulu

- 7.1. Kabupaten Bengkulu Selatan
- 7.2. Kabupaten Bengkulu Tengah
- 7.3. Kabupaten Bengkulu Utara
- 7.4. Kabupaten Bengkulu Kaur
- 7.5. Kabupaten Bengkulu Kapahiang
- 7.6. Kabupaten Bengkulu Lebong
- 7.7. Kabupaten Bengkulu Mukomuko
- 7.8. Kabupaten Bengkulu Rejang Lebong
- 7.9. Kabupaten Bengkulu Seluma
- 7.10. Kota Bengkulu

8. Provinsi Sumatera Selatan

- 8.1. Kabupaten Banyuasin
- 8.2. Kabupaten Empat Lawang
- 8.3. Kabupaten Lahat
- 8.4. Kabupaten Muara Enim
- 8.5. Kabupaten Musi Banyuasin
- 8.6. Kabupaten Musi Rawas
- 8.7. Kabupaten Musi Rawas Utara
- 8.8. Kabupaten Ogan Ilir
- 8.9. Kabupaten Ogan Komering Ilir
- 8.10. Kabupaten Ogan Komering Ulu
- 8.11. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
- 8.12. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- 8.13. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
- 8.14. Kota Lubuklinggau
- 8.15. Kota Pagar Alam
- 8.16. Kota Palembang
- 8.17. Prabumulih

9. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- 9.1. Kabupaten Bangka
- 9.2. Kabupaten Bangka Barat
- 9.3. Kabupaten Bangka Selatan
- 9.4. Kabupaten Bangka Tengah
- 9.5. Kabupaten Belitung
- 9.6. Kabupaten Belitung Timur
- 9.7. Kota Pangkal Pinang

10. Provinsi Lampung

- 10.1. Kabupaten Lampung Tengah
- 10.2. Kabupaten Lampung Utara
- 10.3. Kabupaten Lampung Selatan
- 10.4. Kabupaten Lampung Barat
- 10.5. Kabupaten Lampung Timur
- 10.6. Kabupaten Mesuji
- 10.7. Kabupaten Pesawaran
- 10.8. Kabupaten Pesisir Barat
- 10.9. Kabupaten Pringsewu
- 10.10. Kabupaten Tulang Bawang
- 10.11. Kabupaten Tulang Bawang Barat
- 10.12. Kabupaten Tanggamus
- 10.13. Kabupaten Way Kanan
- 10.14. Kota Bandar Lampung
- 10.15. Kota Metro

11. Provinsi Banten

- 11.1. Kabupaten Lebak
- 11.2. Kabupaten Pandeglang
- 11.3. Kabupaten Serang
- 11.4. Kabupaten Tangerang

- 11.5. Kota Cilegon
- 11.6. Kota Serang
- 11.7. Kota Tangerang
- 11.8. Kota Tangerang Selatan

12. Provinsi Jawa Barat

- 12.1. Kabupaten Bandung
- 12.2. Kabupaten Bandung Barat
- 12.3. Kabupaten Bekasi
- 12.4. Kabupaten Bogor
- 12.5. Kabupaten Ciamis
- 12.6. Kabupaten Cianjur
- 12.7. Kabupaten Cirebon
- 12.8. Kabupaten Garut
- 12.9. Kabupaten Indramayu
- 12.10. Kabupaten Kerawang
- 12.11. Kabupaten Kuningan
- 12.12. Kabupaten Majalengka
- 12.13. Kabupaten Pangandaran
- 12.14. Kabupaten Purwakarta
- 12.15. Kabupaten Subang
- 12.16. Kabupaten Sukabumi
- 12.17. Kabupaten Sumedang
- 12.18. Kabupaten Tasikmalaya
- 12.19. Kota Bandung
- 12.20. Kota Banjar
- 12.21. Kota Bekasi
- 12.22. Kota Bogor
- 12.23. Kota Cimahi
- 12.24. Kota Cirebon
- 12.25. Kota Depok
- 12.26. Kota Sukabumi
- 12.27. Kota Tasikmalaya

13. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

- 13.1. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- 13.2. Kota Administrasi Jakarta Barat
- 13.3. Kota Administrasi Jakarta Pusat
- 13.4. Kota Administrasi Jakarta Selatan
- 13.5. Kota Administrasi Jakarta Timur
- 13.6. Kota Administrasi Jakarta Utara

14. Provinsi Jawa Tengah

- 14.1. Kabupaten Banjarnegara
- 14.2. Kabupaten Banyumas
- 14.3. Kabupaten Batang
- 14.4. Kabupaten Blora
- 14.5. Kabupaten Boyolali
- 14.6. Kabupaten Brebes
- 14.7. Kabupaten Cilacap

- 14.8. Kabupaten Demak
- 14.9. Kabupaten Grobogan
- 14.10. Kabupaten Jepara
- 14.11. Kabupaten Karanganyar
- 14.12. Kabupaten Kebumen
- 14.13. Kabupaten Kendal
- 14.14. Kabupaten Klaten
- 14.15. Kabupaten Kudus
- 14.16. Kabupaten Magelang
- 14.17. Kabupaten Pati
- 14.18. Kabupaten Pekalongan
- 14.19. Kabupaten Pemalang
- 14.20. Kabupaten Purbalingga
- 14.21. Kabupaten Purworejo
- 14.22. Kabupaten Rembang
- 14.23. Kabupaten Semarang
- 14.24. Kabupaten Sragen
- 14.25. Kabupaten Sukoharjo
- 14.26. Kabupaten Tegal
- 14.27. Kabupaten Temanggung
- 14.28. Kabupaten Wonogiri
- 14.29. Kabupaten Wonosobo
- 14.30. Kota Magelang
- 14.31. Kota Pekalongan
- 14.32. Kota Salatiga
- 14.33. Kota Semarang
- 14.34. Kota Surakarta
- 14.35. Kota Tegal

15. Provinsi Jawa Timur

- 15.1. Kabupaten Bangkalan
- 15.2. Kabupaten Banyuwangi
- 15.3. Kabupaten Blitar
- 15.4. Kabupaten Bojonegoro
- 15.5. Kabupaten Bondowoso
- 15.6. Kabupaten Gresik
- 15.7. Kabupaten Jember
- 15.8. Kabupaten Jombang
- 15.9. Kabupaten Kediri
- 15.10. Kabupaten Lamongan
- 15.11. Kabupaten Lumajang
- 15.12. Kabupaten Madiun
- 15.13. Kabupaten Magetan
- 15.14. Kabupaten Malang
- 15.15. Kabupaten Mojokerto
- 15.16. Kabupaten Nganjuk
- 15.17. Kabupaten Ngawi
- 15.18. Kabupaten Pacitan
- 15.19. Kabupaten Pamekasan
- 15.20. Kabupaten Pasuruan

- 15.21. Kabupaten Ponorogo
- 15.22. Kabupaten Probolinggo
- 15.23. Kabupaten Sampang
- 15.24. Kabupaten Sidoarjo
- 15.25. Kabupaten Situbondo
- 15.26. Kabupaten Sumenep
- 15.27. Kabupaten Trenggalek
- 15.28. Kabupaten Tuban
- 15.29. Kabupaten Tulungagung
- 15.30. Kota Batu
- 15.31. Kota Blitar
- 15.32. Kota Kediri
- 15.33. Kota Madiun
- 15.34. Kota Malang
- 15.35. Kota Mojokerto
- 15.36. Kota Pasuruan
- 15.37. Kota Probolinggo
- 15.38. Kota Surabaya

16. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

- 16.1. Kabupaten Bantul
- 16.2. Kabupaten Gunung Kidul
- 16.3. Kabupaten Kulon Progo
- 16.4. Kabupaten Sleman
- 16.5. Kota Yogyakarta

17. Provinsi Bali

- 17.1. Kabupaten Badung
- 17.2. Kabupaten Bangli
- 17.3. Kabupaten Buleleng
- 17.4. Kabupaten Gianyar
- 17.5. Kabupaten Jembrana
- 17.6. Kabupaten Karangasem
- 17.7. Kabupaten Klungkung
- 17.8. Kabupaten Tabanan
- 17.9. Kota Denpasar

18. Provinsi Nusa Tenggara Barat

- 18.1. Kabupaten Bima
- 18.2. Kabupaten Dompu
- 18.3. Kabupaten Lombok Barat
- 18.4. Kabupaten Lombok Tengah
- 18.5. Kabupaten Lombok Timur
- 18.6. Kabupaten Lombok Utara
- 18.7. Kabupaten Sumbawa
- 18.8. Kabupaten Sumbawa Barat
- 18.9. Kota Bima
- 18.10. Kota Mataram

19. Provinsi Nusa Tenggara Timur

- 19.1. Kabupaten Alor
- 19.2. Kabupaten Belu
- 19.3. Kabupaten Ende
- 19.4. Kabupaten Flores Timur
- 19.5. Kabupaten Kupang
- 19.6. Kabupaten Lembata
- 19.7. Kabupaten Malaka
- 19.8. Kabupaten Manggarai
- 19.9. Kabupaten Manggarai Barat
- 19.10. Kabupaten Manggarai Timur
- 19.11. Kabupaten Ngada
- 19.12. Kabupaten Nagekeo
- 19.13. Kabupaten Rote Ndao
- 19.14. Kabupaten Sabu Raijua
- 19.15. Kabupaten Sikka
- 19.16. Kabupaten Sumba Barat
- 19.17. Kabupaten Sumba Barat Daya
- 19.18. Kabupaten Sumba Tengah
- 19.19. Kabupaten Sumba Timur
- 19.20. Kabupaten Timur Tengah Selatan
- 19.21. Kabupaten Timur Tengah Utara
- 19.22. Kota Kupang

20. Provinsi Kalimantan Barat

- 20.1. Kabupaten Bengkayang
- 20.2. Kabupaten Kapuas Hulu
- 20.3. Kabupaten Kayong Utara
- 20.4. Kabupaten Ketapang
- 20.5. Kabupaten Kubu Raya
- 20.6. Kabupaten Landak
- 20.7. Kabupaten Melawi
- 20.8. Kabupaten Pontianak
- 20.9. Kabupaten Sambas
- 20.10. Kabupaten Sanggau
- 20.11. Kabupaten Sekadau
- 20.12. Kabupaten Sintang
- 20.13. Kota Pontianak
- 20.14. Kota Singkawang

21. Provinsi Kalimantan Selatan

- 21.1. Kabupaten Balangan
- 21.2. Kabupaten Banjar
- 21.3. Kabupaten Barito Kuala
- 21.4. Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- 21.5. Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- 21.6. Kabupaten Hulu Sungai Utara
- 21.7. Kabupaten Kotabaru
- 21.8. Kabupaten Tabalong

- 21.9. Kabupaten Tanah Bumbu
- 21.10. Kabupaten Tanah Laut
- 21.11. Kabupaten Tapin
- 21.12. Kota Banjarbaru
- 21.13. Kota Banjarmasin

22. Provinsi Kalimantan Tengah

- 22.1. Kabupaten Barito Selatan
- 22.2. Kabupaten Barito Timur
- 22.3. Kabupaten Barito Utara
- 22.4. Kabupaten Gunung Mas
- 22.5. Kabupaten Kapuas
- 22.6. Kabupaten Katingan
- 22.7. Kabupaten Kotawaringin Barat
- 22.8. Kabupaten Kotawaringin Timur
- 22.9. Kabupaten Lamandau
- 22.10. Kabupaten Murung Raya
- 22.11. Kabupaten Pulang Pisau
- 22.12. Kabupaten Sukamara
- 22.13. Kabupaten Seruyan
- 22.14. Kota Palangka Raya

23. Provinsi Kalimantan Timur

- 23.1. Kabupaten Berau
- 23.2. Kabupaten Kutai Barat
- 23.3. Kabupaten Kutai Kartanegara
- 23.4. Kabupaten Kutai Timur
- 23.5. Kabupaten Mahakam Ulu
- 23.6. Kabupaten Paser
- 23.7. Kabupaten Panajam Paser Utara
- 23.8. Kota Balikpapan
- 23.9. Kota Bontang
- 23.10. Kota Samarinda

24. Provinsi Kalimantan Utara

- 24.1. Kabupaten Bulungan
- 24.2. Kabupaten Malinau
- 24.3. Kabupaten Nunukan
- 24.4. Kabupaten Tana Tidung
- 24.5. Kota Tarakan

25. Provinsi Gorontalo

- 25.1. Kabupaten Boalemo
- 25.2. Kabupaten Bone Bolango
- 25.3. Kabupaten Gorontalo
- 25.4. Kabupaten Gorontalo Utara
- 25.5. Kabupaten Pohuwato
- 25.6. Kota Gorontalo

26. Provinsi Sulawesi Selatan

- 26.1. Kabupaten Bantaeng
- 26.2. Kabupaten Barru
- 26.3. Kabupaten Bone
- 26.4. Kabupaten Bulukumba
- 26.5. Kabupaten Enrekang
- 26.6. Kabupaten Gowa
- 26.7. Kabupaten Jeneponto
- 26.8. Kabupaten Kepulauan Selayar
- 26.9. Kabupaten Luwu
- 26.10. Kabupaten Luwu Timur
- 26.11. Kabupaten Luwu Utara
- 26.12. Kabupaten Maros
- 26.13. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- 26.14. Kabupaten Pinrang
- 26.15. Kabupaten Sidenreng Rappang
- 26.16. Kabupaten Sinjai
- 26.17. Kabupaten Soppeng
- 26.18. Kabupaten Takalar
- 26.19. Kabupaten Tana Toraja
- 26.20. Kabupaten Toraja Utara
- 26.21. Kabupaten Wajo
- 26.22. Kota Makassar
- 26.23. Kota Palopo
- 26.24. Kota Parepare

27. Provinsi Sulawesi Tenggara

- 27.1. Kabupaten Bombana
- 27.2. Kabupaten Buton
- 27.3. Kabupaten Buton Selatan
- 27.4. Kabupaten Buton Tengah
- 27.5. Kabupaten Buton Utara
- 27.6. Kabupaten Kolaka
- 27.7. Kabupaten Kolaka Timur
- 27.8. Kabupaten Kolaka Utara
- 27.9. Kabupaten Konawe
- 27.10. Kabupaten Konawe Kepulauan
- 27.11. Kabupaten Konawe Selatan
- 27.12. Kabupaten Konawe Utara
- 27.13. Kabupaten Muna
- 27.14. Kabupaten Muna Barat
- 27.15. Kabupaten Wakatobi
- 27.16. Kota Baubau
- 27.17. Kota Kendari

28. Provinsi Sulawesi Tengah

- 28.1. Kabupaten Banggai
- 28.2. Kabupaten Banggai Kepulauan
- 28.3. Kabupaten Banggai Laut

- 28.4. Kabupaten Buol
- 28.5. Kabupaten Donggala
- 28.6. Kabupaten Morowali
- 28.7. Kabupaten Morowali Utara
- 28.8. Kabupaten Parigi Moutong
- 28.9. Kabupaten Poso
- 28.10. Kabupaten Sigi
- 28.11. Kabupaten Tojo Una-Una
- 28.12. Kabupaten Toli-Toli
- 28.13. Kota Palu

29. Provinsi Sulawesi Utara

- 29.1. Kabupaten Bolaang Mongondow
- 29.2. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
- 29.3. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- 29.4. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
- 29.5. Kabupaten Kepulauan Sangihe
- 29.6. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
- 29.7. Kabupaten Kepulauan Talaud
- 29.8. Kabupaten Minahasa
- 29.9. Kabupaten Minahasa Selatan
- 29.10. Kabupaten Minahasa Tenggara
- 29.11. Kabupaten Minahasa Utara
- 29.12. Kota Bitung
- 29.13. Kota Kotamobagu
- 29.14. Kota Manado
- 29.15. Kota Tomohon

30. Provinsi Sulawesi Barat

- 30.1. Kabupaten Majene
- 30.2. Kabupaten Minahasa
- 30.3. Kabupaten Mamuju
- 30.4. Kabupaten Mamuju Tengah
- 30.5. Kabupaten Mamuju Utara
- 30.6. Kabupaten Polewali Mandar

31. Provinsi Maluku

- 31.1. Kabupaten Baru
- 31.2. Kabupaten Baru Selatan
- 31.3. Kabupaten Kepulauan Aru
- 31.4. Kabupaten Maluku Barat Daya
- 31.5. Kabupaten Maluku Tengah
- 31.6. Kabupaten Maluku Tenggara
- 31.7. Kabupaten Maluku Tenggara Barat
- 31.8. Kabupaten Kepulauan Seram Barat
- 31.9. Kabupaten Kepulauan Seram Timur
- 31.10. Kota Ambon
- 31.11. Kota Tual

32. Provinsi Maluku Utara

- 32.1. Kabupaten Halmahera Barat
- 32.2. Kabupaten Halmahera Tengah
- 32.3. Kabupaten Halmahera Timur
- 32.4. Kabupaten Halmahera Utara
- 32.5. Kabupaten Kepulauan Sula
- 32.6. Kabupaten Pulau Morotai
- 32.7. Kabupaten Taliabu
- 32.8. Kota Ternate
- 32.9. Kota Tidore Kepulauan

33. Provinsi Papua

- 33.1. Kabupaten Asmat
- 33.2. Kabupaten Biak Nunfor
- 33.3. Kabupaten Boven Digoel
- 33.4. Kabupaten Deiyai
- 33.5. Kabupaten Dogiyai
- 33.6. Kabupaten Intan Jaya
- 33.7. Kabupaten Jayapura
- 33.8. Kabupaten Jayawijaya
- 33.9. Kabupaten Keerom
- 33.10. Kabupaten Kepulauan Yapen
- 33.11. Kabupaten Lanny Jaya
- 33.12. Kabupaten Memberamo Raya
- 33.13. Kabupaten Memberamo Tengah
- 33.14. Kabupaten Mappi
- 33.15. Kabupaten Merauke
- 33.16. Kabupaten Mimika
- 33.17. Kabupaten Nabire
- 33.18. Kabupaten Nduga
- 33.19. Kabupaten Paniai
- 33.20. Kabupaten Pegunungan Bintang
- 33.21. Kabupaten Puncak
- 33.22. Kabupaten Puncak Jaya
- 33.23. Kabupaten Sarmi
- 33.24. Kabupaten Supiori
- 33.25. Kabupaten Toikara
- 33.26. Kabupaten Waropen
- 33.27. Kabupaten Yahukimo
- 33.28. Kabupaten Yulimo
- 33.29. Kota Jayapura

34. Provinsi Papua Barat

- 34.1. Kabupaten Fakfak
- 34.2. Kabupaten Kaimana
- 34.3. Kabupaten Manokwari
- 34.4. Kabupaten Manokwari Selatan
- 34.5. Kabupaten Maybrat
- 34.6. Kabupaten Pegunungan Arfak

- 34.7. Kabupaten Raja Ampat
- 34.8. Kabupaten Sorong
- 34.9. Kabupaten Sorong Selatan
- 34.10. Kabupaten Tambrau
- 34.11. Kabupaten Teluk Bintuni
- 34.12. Kabupaten Teluk Wondama
- 34.13. Kota Sorong

BUKU PANDUAN

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional diperlukan rencana pembangunan yang berkualitas. Salah satu peran Kementerian PPN/Bappenas adalah menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas. Dalam rangka mewujudkan rencana pembangunan nasional (RPJPN, RPJMN dan RKP) yang berkualitas tersebut, maka diperlukan proses integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun di antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Untuk mewujudkan rencana pembangunan yang berkualitas, diperlukan upaya yang berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di badan atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyiapkan, merumuskan, dan menyusun, serta melakukan pemantauan rencana pembangunan baik di instansi pusat dan daerah. Peningkatan kualitas ASN perencana diarahkan tidak saja hanya pada peningkatan pengetahuan dan keahlian perencana, tapi juga diarahkan pada perilaku perencana yang profesional.

Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan fasilitasi dan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana, dan program pendidikan dan pelatihan kepada ASN Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta institusi perencana di pusat dan daerah. Peningkatan kompetensi ASN perencana dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan (diklat) baik gelar maupun non-gelar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ASN di berbagai bidang perencanaan pembangunan. Program Diklat Gelar terdiri dari program S2 di dalam negeri dan luar negeri, program S2 *Linkage* (1 tahun di dalam negeri dan 1 tahun di luar negeri), serta S3 baik di dalam dan luar negeri.

Pada tahun 2018, jumlah peserta yang mengikuti seleksi gelar Pusbindiklatren mencapai 3.108 orang, dengan sebanyak 2.385 lulus seleksi administrasi untuk mengikuti proses seleksi akademik. Dari hasil seleksi akademik, terjaring sebanyak 548 calon peserta yang siap ditempatkan untuk program beasiswa gelar, namun hanya 450 orang yang dapat ditempatkan dalam program beasiswa PHRD IV, dan 14 orang untuk peserta *split site*.

Sejalan dengan fungsinya sebagai instansi pembina jabatan fungsional perencana dan dalam rangka meningkatkan kompetensi ASN untuk mendukung sinergi perencanaan pusat dan daerah, Kementerian PPN/Bappenas membuka kesempatan bagi para ASN yang bekerja di Kementerian PPN/Bappenas, unit perencanaan di kementerian/lembaga, Bappeda atau instansi setingkat yang menangani perencanaan, unit perencanaan di organisasi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dan/atau unit kerja lainnya yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan, untuk mengikuti Program Beasiswa yang dikelola Pusbindiklatren Bappenas tahun 2019. Program beasiswa untuk gelombang II meliputi pendidikan gelar jenjang S2 dalam negeri dengan pilihan program studi dan kuota masing-masing program studi terlampir.

1.2. Tujuan

Program beasiswa Pusbindiklatren Bappenas ditujukan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur pemerintah yang bertugas pada bidang perencanaan pembangunan baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah provinsi, kota dan kabupaten.

PROGRAM BEASISWA

2.1. Informasi Program Beasiswa Gelombang II Tahun 2019

Dalam pelaksanaan Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas Gelombang II tahun 2019, Pusbindiklatren Bappenas menawarkan program beasiswa untuk program S2 Dalam Negeri di 25 (dua puluh lima) program studi pada 11 (sebelas) universitas, yang bekerja sama dengan Pusbindiklatren untuk jangka waktu perkuliahan selama 18 bulan dengan kuota sebagaimana terlampir.

2.2. Persyaratan Program Beasiswa

Berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 perihal Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar, diinformasikan bahwa untuk program Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas tahun 2019 akan mengacu kepada persyaratan yang tercantum dalam Surat Edaran Kemenpan RB tersebut dan atau disesuaikan dengan persyaratan dari masing-masing instansi untuk penetapan tugas belajar, yakni:

NO	PERSYARATAN	S2 DN
1	SYARAT ADMINISTRATIF	
	Pengusulan Dari Instansi	Eselon II Kepegawaian
	Unit Kerja	Unit Kerja Perencanaan
	PNS 100% Minimal Gol IIIA	1 Tahun
	Strata Pendidikan Min.	D4/S1*
	Minimal Tahun Lulus S1/S2	2 Tahun
	Umur Maksimal	37 Tahun*
	IPK Minimal	2.75
	Surat Keterangan Rencana Pengembangan SDM	Eselon II Kepegawaian
2	SELEKSI NASIONAL	
	Tes Potensi Akademik	
	Pusat	565
	Pusat Luar Jawa	525
	Pemda Jawa	525
	Pemda Luar Jawa	500
	TOEFL Minimal	450
	IBT TOEFL setelah EAP	
	Wawancara Tertulis	Menunjukkan Komitmen

Keterangan :

* Hanya beberapa program studi menerima peserta dengan latar belakang pendidikan D4.

**Batas maksimal usia pendaftar ialah 37 tahun per 1 Agustus 2019, dan/atau maksimal kelahiran 31 Juli 1982 dan setelahnya.

Selain itu, perlu kami sampaikan bahwa beberapa program studi memiliki perbedaan persyaratan tersendiri diluar dari persyaratan Pusbindiklatren Bappenas, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Untuk program S2 Dalam Negeri di lingkup Institut Teknologi Bandung, minimal nilai *Institutional* TOEFL yang dibutuhkan ialah 475;
- b. Untuk program S2 Dalam Negeri di lingkup Universitas Indonesia, minimal nilai *Institutional* TOEFL yang dibutuhkan ialah 500.

Bagi peserta dengan latar belakang pendidikan D4, berikut kami sampaikan ketentuan di masing-masing program studi:

a. Menerima Calon Karyasiswa lulusan D4

- Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Syiah Kuala;
- Magister Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya;
- Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Brawijaya;
- Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya;
- Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada;
- Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Padjadjaran;
- Magister Ekonomi Pembangunan, Universitas Padjadjaran;
- Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia;

b. Menerima Calon Karyasiswa lulusan D4 dengan syarat

- Magister Sistem dan Teknik Transportasi, Universitas Gadjah Mada dengan syarat lulusan dari STTD, STIP dan STPI;
- Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia dengan syarat lulusan dari STAN dan STIS;
- Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro dengan syarat mengikuti perkuliahan tambahan dengan biaya sendiri;
- Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gadjah Mada dengan syarat linear dengan MPKD serta pernah mengikuti minimal diklat JFP Muda yang diselenggarakan oleh Bappenas dan atau lembaga mitra yang setara;
- Magister Ekonomi Pembangunan, Universitas Gadjah Mada dengan syarat lulusan STAN, STIS, IPDN/STPDN/IIP, STPN, STIA LAN dan STIE;
- Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro;
- Magister Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan (MEKK), Universitas Indonesia;
- Magister Geo-Informasi untuk Manajemen Bencana, Universitas Gadjah Mada dengan syarat lulusan IPDN/STPDN/IIP.

c. Tidak Menerima Calon Karyasiswa D4

- Magister Studi Pembangunan, Institut Teknologi Bandung;
- Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung;
- Magister Transportasi, Institut Teknologi Bandung;
- Magister Perencanaan Pembangunan, Universitas Andalas;
- Magister Perencanaan Wilayah, Institut Pertanian Bogor;
- Magister Perencanaan Wilayah, Universitas Hasanuddin;

Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 perihal Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar, kami informasikan juga bahwa untuk

daerah-daerah terpencil, tertinggal dan terluar (daftar daerah terlampir), usia maksimal dapat ditetapkan menjadi :

- a) Program Strata II (S-2) atau setara (baik S2 Dalam Negeri maupun S2 *Linkage*), berusia maksimal 42 (empat puluh dua) tahun*;
- b) Program Strata III (S-3) atau setara (baik S3 Dalam Negeri), berusia maksimal 47 (empat puluh tujuh) tahun*.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015–2019, berikut ini daftar daerah tertinggal yang berjumlah 122 Kabupaten.

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KETERANGAN
1	NAD	Aceh Singkil	-
2	Sumatera Utara	Nias Barat	-
3	Sumatera Utara	Nias Utara	-
4	Sumatera Utara	Nias	-
5	Sumatera Utara	Nias Selatan	-
6	Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	-
7	Sumatera Barat	Pasaman Barat	-
8	Sumatera Barat	Solok Selatan	-
9	Sumatera Selatan	Musi Rawas	-
10	Sumatera Selatan	Musi Rawas Utara	DOB
11	Bengkulu	Seluma	-
12	Lampung	Lampung Barat	-
13	Lampung	Pesisir Barat	DOB
14	Jawa Timur	Bondowoso	-
15	Jawa Timur	Situbondo	-
16	Jawa Timur	Bangkalan	-
17	Jawa Timur	Sampang	-
18	Banten	Pandeglang	-
19	Banten	Lebak	-
20	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat	-
21	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	-
22	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur	-
23	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	-
24	Nusa Tenggara Barat	Dompu	-
25	Nusa Tenggara Barat	Bima	-
26	Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara	-

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KETERANGAN
27	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa Barat	-
28	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat	-
29	Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	-
30	Nusa Tenggara Timur	Kupang	-
31	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Selatan	-
32	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Utara	-
33	Nusa Tenggara Timur	Belu	-
34	Nusa Tenggara Timur	Alor	-
35	Nusa Tenggara Timur	Lembata	-
36	Nusa Tenggara Timur	Ende	-
37	Nusa Tenggara Timur	Manggarai	-
38	Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	-
39	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Barat	-
40	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya	-
41	Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah	-
42	Nusa Tenggara Timur	Nagekeo	-
43	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Timur	-
44	Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	-
45	Nusa Tenggara Timur	Malaka	DOB
46	Kalimantan Barat	Sambas	-
47	Kalimantan Barat	Bengkayang	-
48	Kalimantan Barat	Landak	-
49	Kalimantan Barat	Ketapang	-
50	Kalimantan Barat	Sintang	-
51	Kalimantan Barat	Kapuas Hulu	-
52	Kalimantan Barat	Melawi	-
53	Kalimantan Barat	Kayong Utara	-
54	Kalimantan Tengah	Seruyan	-
55	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Utara	-
56	Kalimantan Utara	Nunukan	-
57	Kalimantan Timur	Mahakam Ulu	DOB
58	Gorontalo	Boalemo	-
59	Gorontalo	Gorontalo Utara	-
60	Gorontalo	Pohuwato	-

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KETERANGAN
61	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	-
62	Sulawesi Tengah	Toli-Toli	-
63	Sulawesi Tengah	Donggala	-
64	Sulawesi Tengah	Parigi Moutong	-
65	Sulawesi Tengah	Tojo Una Una	-
66	Sulawesi Tengah	Sigi	-
67	Sulawesi Tengah	Buol	-
68	Sulawesi Tengah	Banggai Laut	DOB
69	Sulawesi Tengah	Morowali Utara	DOB
70	Sulawesi Selatan	Jeneponto	-
71	Sulawesi Barat	Polewali Mandar	-
72	Sulawesi Barat	Mamuju Tengah	DOB
73	Sulawesi Tenggara	Konawe	-
74	Sulawesi Tenggara	Bombana	-
75	Sulawesi Tenggara	Konawe Kepulauan	DOB
76	Maluku	Kab. Maluku Tenggara Barat	-
77	Maluku	Kab. Maluku Tengah	-
78	Maluku	Kab. Pulau Buru	-
79	Maluku	Kab. Seram Bagian Barat	-
80	Maluku	Kab. Seram Bagian Timur	-
81	Maluku	Kab. Kepulauan Aru	-
82	Maluku	Kab. Maluku Barat Daya	-
83	Maluku	Kab. Buru Selatan	-
84	Maluku Utara	Kab. Halmahera Barat	-
85	Maluku Utara	Kab. Halmahera Timur	-
86	Maluku Utara	Kab. Kepulauan Sula	-
87	Maluku Utara	Kab. Halmahera Selatan	-
88	Maluku Utara	Kab. Morotai	-
89	Maluku Utara	Kab. Pulau Taliabu	DOB
90	Papua	Keerom	-
91	Papua	Sarmi	-
92	Papua	Pegunungan Bintang	-
93	Papua	Memberamo Tengah	-
94	Papua	Biak Numfor	-

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KETERANGAN
95	Papua	Supiori	-
96	Papua	Kepulauan Yapen	-
97	Papua	Waropen	-
98	Papua	Memberamo Raya	-
99	Papua	Merauke	-
100	Papua	Asmat	-
101	Papua	Mappi	-
102	Papua	Boven Digoel	-
103	Papua	Nabire	-
104	Papua	Intan Jaya	-
105	Papua	Deiyai	-
106	Papua	Dogiyai	-
107	Papua	Paniai	-
108	Papua	Jayawijaya	-
109	Papua	Lanny Jaya	-
110	Papua	Yalimo	-
111	Papua	Yahukimo	-
112	Papua	Tolikara	-
113	Papua	Puncak	-
114	Papua	Puncak Jaya	-
115	Papua	Nduga	-
116	Papua Barat	Sorong	-
117	Papua Barat	Sorong Selatan	-
118	Papua Barat	Maybrat	-
119	Papua Barat	Tambrauw	-
120	Papua Barat	Raja Ampat	-
121	Papua Barat	Teluk Bintuni	-
122	Papua Barat	Teluk Wondama	-

Keterangan : Hanya berlaku untuk ASN yang berasal dari Pemerintah Daerah Kota atau Kabupaten di atas.

2.3. Jadwal Pelaksanaan Program Beasiswa

Jadwal Seleksi Program Beasiswa Pusbindiklatren, Kementerian PPN/Bappenas sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	Surat Penawaran Gelombang II Beasiswa Pusbindiklatren 2019	Januari 2019
2	<i>Deadline Registrasi Online</i>	22 Februari 2019
3	<i>Deadline Cap Pos Pengiriman Berkas Peserta</i>	22 Februari 2019
4	Pemanggilan Peserta Seleksi Nasional TPA Gelombang II 2019	Maret 2019*
5	Seleksi Nasional TPA Gelombang II 2019	Maret 2019*
6	Pemanggilan Peserta Seleksi Nasional TOEFL Gelombang II 2019	April 2019*
7	Seleksi Nasional TOEFL Gelombang II 2019	April 2019*
8	Pengumuman Program S2 Dalam Negeri	Mei 2019*

***Keterangan : Jika terjadi perubahan jadwal, akan diinformasikan di kemudian hari.**

2.4. Pilihan Program Studi

Program S2 Dalam Negeri:

NO	PROGRAM STUDI	KUOTA TERSEDIA
1	Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Syiah Kuala;	8
2	Magister Perencanaan Pembangunan, Universitas Andalas;	9
3	Magister Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya;	13
4	Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Universitas Indonesia;	11
5	Magister Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Universitas Indonesia;	14
6	Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia;	9
7	Magister Studi Ilmu Perencanaan Wilayah, Institut Pertanian Bogor;	14
8	Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung;	10
9	Magister Studi Pembangunan, Institut Teknologi Bandung;	12
10	Magister Ekonomi Terapan, Universitas Padjadjaran;	7
11	Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Padjadjaran;	13
12	Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro;	11
13	Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro;	13
14	Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Gadjah Mada;	6
15	Magister Ekonomi Pembangunan, Universitas Gadjah Mada;	8
16	Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada;	3
17	Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya;	10
18	Program Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Peminatan Manajemen Perencanaan, Universitas Hasanuddin;	11
19	Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Brawijaya;	7
20	Magister Sistem dan Teknik Transportasi, Universitas Gadjah Mada;	3
21	Magister Geo Informasi untuk Manajemen Bencana, Universitas Gadjah Mada;	3
22	Magister Transportasi, Institut Teknologi Bandung;	5
23	Magister Manajemen Pembangunan Daerah, Institut Pertanian Bogor;	5
24	Magister Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan dan Pembangunan, Universitas Brawijaya;	5
25	Magister Studi Kebijakan/Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan, Universitas Gadjah Mada.	5
	TOTAL	215

2.5. Prosedur Pelamaran

1. Peserta yang berhak melamar program beasiswa Pusbindiklatren adalah mereka yang memenuhi persyaratan seperti yang disebutkan di atas dan belum pernah mengambil/memiliki gelar S2 untuk yang melamar beasiswa S2;
2. Peserta yang telah memenuhi persyaratan di atas, diharuskan mengisi formulir pendaftaran **secara online** dan diusulkan secara resmi oleh instansi asalnya melalui pejabat pengelola kepegawaian dan/atau atasan langsung (**minimal pejabat eselon II BKD/Biro Kepegawaian/Biro SDM masing-masing daerah**). Surat usulan yang dimaksud harus menyebutkan nama-nama pegawai yang diusulkan oleh instansi serta program/topik beasiswa yang diminati;
3. Peserta yang diprioritaskan adalah: a) Fungsional Perencana; b) Perencana di Instansi Perencanaan atau yang bekerja di unit kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di Bidang Perencanaan; dan c) ASN yang uraian pekerjaannya berhubungan dengan perencanaan pembangunan;
4. Pusbindiklatren telah mengunggah berkas penawaran beasiswa Pusbindiklatren pada situs Pusbindiklatren Bappenas di <http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id>;
5. Jika peserta mengalami kesulitan dalam proses registrasi *online*, peserta diperkenankan menggunakan formulir manual yang terdapat dalam lampiran;
6. Pusbindiklatren hanya akan menindaklanjuti formulir pendaftaran yang **bermaterai, bertandatangan asli dan cap basah** dengan persetujuan dari pejabat pengelola kepegawaian (**minimal pejabat eselon II BKD/Biro Kepegawaian/Biro SDM masing-masing daerah**);
7. Formulir pendaftaran harus disertai/dilengkapi dengan dokumen pendukung yaitu:
 - a) Surat usulan dari Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD setempat (**minimal pejabat eselon II BKD/Biro Kepegawaian/Biro SDM masing-masing daerah**);
 - b) Formulir Wawancara Tertulis yang telah diisi dan ditandatangani;
 - c) Formulir rencana pengembangan SDM yang ditandatangani oleh Kepala BKD/Kepala Biro yang menangani urusan SDM;
 - d) Ijazah dan transkrip S1/S2, yang telah dilegalisasi;
 - e) Fotokopi SK Pengangkatan PNS 100% pada golongan III/a dan/atau SK pengangkatan terakhir, yang telah dilegalisasi;
 - f) Khusus bagi para Pejabat Fungsional Perencana harus melampirkan SK jabatan terakhir yang dilegalisasi;
 - g) Pernyataan Rencana Studi (dalam bentuk esai), sebagaimana format terlampir.
6. Peserta yang memenuhi syarat administrasi (MS), lulus TPA dan TOEFL akan diproses untuk seleksi penempatan selama 2 tahun (selama nilai TPA dan TOEFLnya masih berlaku), **dengan syarat** diusulkan kembali oleh pejabat pengelola kepegawaian (minimal Pejabat Eselon II), kecuali ada surat pembatalan pencalonan dari instansi asalnya (minimal Pejabat Eselon II).

2.6. Komponen Biaya

Informasi terkait dengan biaya yang ditanggung oleh Pusbindiklatren Bappenas, dapat dilihat dalam Buku Panduan Karyasiswa Tahun 2018 yang terdapat dalam *website* Pusbindiklatren Bappenas. (Jika terdapat perubahan terkait dengan komponen beasiswa yang akan diterima, akan kami informasikan kemudian)

2.7. Sanksi





1. Jika dalam hal tertentu peserta memutuskan untuk mengundurkan diri dari program studi secara sepihak, maka berdasarkan Surat Perjanjian, peserta **harus** mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Pusbindiklatren sejak proses seleksi hingga tanggal keputusan pembatalan pemberian beasiswa kepada kas negara, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 1961, Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961, dan Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 perihal Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar;
2. Peserta akan **dikenakan sanksi** jika dalam proses seleksi, penempatan, maupun selama mengikuti pendidikan, Pusbindiklatren menemukan data yang tidak sesuai dalam Formulir Calon Penerima Beasiswa Pusbindiklatren (formulir pendaftaran) maupun dengan kriteria seleksi Pusbindiklatren;
3. Sanksi yang dimaksud pada *point* di atas dapat berupa:
 - a) Pembatalan pencalonan sebagai penerima beasiswa jika diketahui sebelum proses seleksi dilakukan;
 - b) Pembatalan pemberian beasiswa dan penggantian biaya seleksi jika diketahui dalam proses penempatan;
 - c) Pertimbangan kembali terhadap instansi dan/atau unit kerja terkait dalam proses penempatan karyasiswa di kemudian hari.

LAMPIRAN**Format Pernyataan Rencana Studi**







- Paragraf 1 : Latar Belakang Pendidikan sebelumnya, S1 untuk yang bermaksud mengambil program S2;
- Paragraf 2 : Riwayat pekerjaan atau pengalaman kerja yang berisikan uraian tugas dan fungsi pokok pekerjaan sehari-hari;
- Paragraf 3 : Alasan memilih bidang studi yang diinginkan serta dikaitkan dengan latar belakang pendidikan sebelumnya dan dengan tugas dan fungsi pokok pekerjaan sehari-hari;
- Paragraf 4 : Rencana penelitian untuk tugas akhir Saudara yang dapat memberikan manfaat secara langsung terhadap instansi/institusi tempat Saudara bertugas dan pembangunan Indonesia

Panduan Registrasi *Online*

Pendaftaran bagi peserta baru dan belum pernah sama sekali mengikuti diklat di Pusbindiklatren Bappenas:

1. Silakan masuk ke Menu DAFTAR: <http://pusbindiklatren.bappenas.go.id/daftar>
2. Masukkan NIP Anda lalu  klik CEK
3. Apabila Anda belum terdaftar, lalu isikan: *User Name*, Nama Lengkap, Email, *Password*, *Re-Password* lalu  klik DAFTAR.
4. Kemudian silahkan Anda cek di email untuk melihat notifikasi pemberitahuan aktivasi akun Anda.
5. Lalu  klik link aktivasi, nanti akan diarahkan ke halaman lain.
6. Bila ada pertanyaan atau *Alert*  klik OK
7. Kemudian *Login* dengan memasukkan NIP dan *Password* yang sebelumnya sudah dibuat.

Pendaftaran bagi peserta yang sebelumnya sudah pernah mengikuti diklat di Pusbindiklatren Bappenas:

1. Untuk mendapatkan *username* dan *password* masuk ke Menu ***Lupa Password***: <http://pusbindiklatren.bappenas.go.id/daftar/forgot.php>;
2. Masukkan *email* yang sebelumnya pernah didaftarkan, jika nanti *email* Anda belum terdaftar di data Diklat Pusbindiklatren Bappenas, silakan Anda mengirim *email* ke Pusbindiklatren Bappenas dengan *email address*: pusbindiklatren@bappenas.go.id Perihal *up date email* Anda;
3. Lalu  klik KIRIM;
4. Kemudian lihat *email* dan  klik *link Forgot Password*;
5. Jika terdapat peringatan/*Alert*  klik OK;
6. Silakan  klik DIKLAT GELAR/DIKLAT NON GELAR;
7. Lalu isikan formulir yang sudah tersedia;
8. Setelah formulir diisikan semua lalu  klik DAFTAR/UBAH;
9. Untuk mendapatkan formulir yang sudah diisikan  klik UNDUH;

KOP SURAT
BKD/BIRO KEPEGAWAIAN/BIRO SDM
PERNYATAAN PENGEMBANGAN SDM

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 Instansi :

Dengan ini merangkan bahwa, pegawai atas nama:

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 Instansi :

Adalah ASN pada instansi tersebut di atas dan yang bersangkutan memilih program beasiswa Pusbindiklatren dengan urutan pilihan program studi sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.
5.

**PILIHAN PROGRAM STUDI HARUS KONSISTEN
ANTARA PENGEMBANGAN SDM DAN FORMULIR
CETAK ONLINE**

Pilihan-pilihan program tersebut sudah sesuai dengan rencana pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pada instansi calon peserta tersebut, sehingga diharapkan keikutsertaan pegawai tersebut akan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan serta peningkatan kinerja instansi/institusi pegawai tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya tanda tangani untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... 2019

Kepala BKD/Kepala Biro SDM,

(Materai 6000, TTD dan Cap Basah)

(.....)
NIP

Tembusan:
Atasan langsung yang bersangkutan.

**FORMULIR WAWANCARA TERTULIS
BEASISWA PUSBINDIKLATREN BAPPENAS TAHUN 2019**

PETUNJUK

- ◆ Pilihlah jawaban Anda pada kotak-kotak yang telah tersedia di bawah ini dengan memberi tanda (✓) menggunakan pulpen/ballpoint.
- ◆ Pertanyaan harus dijawab semua. Jika ada pertanyaan yang tidak dijawab, pilihan jawaban akan dianggap tidak

=====

DATA PRIBADI

1. Nama :
2. NIP :

APAKAH SAUDARA BERSEDIA

1. Melengkapi dokumen-dokumen pesertaan ke program studi perguruan tinggi tujuan sesuai dengan yang dipersyaratkan?
 - Ya
 - Tidak
2. Mematuhi jadwal pengumpulan dokumen yang ditentukan Pusbindiklatren?
 - Ya
 - Tidak
3. Mengundurkan diri apabila Pusbindiklatren membatalkan pencalonan Saudara karena :
 - a. terdapat perbedaan data/informasi yang Saudara tulis dalam Formulir Calon Penerima Beasiswa dengan dokumen/fakta yang sebenarnya, dan/atau
 - b. dengan sengaja memberikan data/informasi yang salah demi memenuhi kriteria yang dipersyaratkan Pusbindiklatren
 - Ya
 - Tidak
4. Mengganti semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Pusbindiklatren kepada Kantor Kas Negara (sejak proses seleksi hingga akhir masa pemberian beasiswa) serta menerima seluruh konsekuensi yang akan terjadi terhadap Saudara dan/atau instansi Saudara, jika mengundurkan diri dari program beasiswa Pusbindiklatren diluar jadwal yang sudah ditetapkan Pusbindiklatren?
 - Ya
 - Tidak
5. Menerima beasiswa S2/S3 sesuai dengan keputusan, ketentuan, dan prosedur yang ditetapkan bagi penerima beasiswa Pusbindiklatren?
 - Ya
 - Tidak

6. Mengikuti dengan tertib jadwal proses penempatan sesuai ketentuan Pusbindiklatren?
- Ya
 Tidak
7. Menerima pilihan program S2/S3 yang ditentukan oleh Pusbindiklatren sesuai dengan kriteria penempatan beasiswa Pusbindiklatren (TPA, TOEFL, Uraian Pekerjaan, Latar Belakang Pendidikan, Kategori Wilayah, Pilihan Program Studi, dan lainnya), jika Saudara lulus dalam seleksi beasiswa Pusbindiklatren?
- Ya
 Tidak
8. Menyelesaikan program studi dalam jangka waktu beasiswa yang ditentukan Pusbindiklatren?
- Ya
 Tidak
9. Meningkatkan skor TOEFL yang dipersyaratkan serendah-rendahnya 550 dan/atau IELTS 6.5 dan/atau sesuai dengan nilai yang dipersyaratkan universitas luar negeri (jika terpilih untuk mengikuti program pendidikan gelar *Linkage*)?
- Ya
 Tidak
10. Mengikuti proses peserta selama-lamanya 6 (enam) bulan? (bagi yang terpilih untuk mengikuti program pendidikan gelar S3 DN)
- Ya
 Tidak
11. Menanggung sendiri biaya kuliah dan biaya hidup jika sampai dengan batas akhir pemberian beasiswa Pusbindiklatren, Saudara belum dapat menyelesaikan studi?
- Ya
 Tidak
12. Menjaga nama baik Pusbindiklatren, selaku pemberi beasiswa, dengan menunjukkan sikap perilaku yang baik selama studi?
- Ya
 Tidak
13. Beasiswa yang sedang dan/atau akan Saudara lamar?
- a. Program Beasiswa Yang Diikuti :
- b. Estimasi Waktu Penerimaan :
- c. Gelar yang telah/akan diperoleh :

14. Jika ada saran/komentar/pendapat atau hal lain yang perlu Saudara ungkapkan mengenai pertanyaan diatas, silakan tulis di bawah ini :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Dengan ini saya menyatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas dijawab dengan benar dan jika di kemudian hari terdapat kesalahan atas jawaban tersebut, saya bersedia menerima sanksi yang telah ditentukan oleh Pusbindiklatren.

.....,..... 2019

Yang Bersangkutan,

(Materai 6000 dan TTD)

(.....)